

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN DAERAH UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

Rizky Adi Pratama

NPP. 30.0429

Asdaf Kabupaten Bengkulu utara, Provinsi Bengkulu

Program Studi Keuangan Publik

Email: adipratamarizky83@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Tun Huseno, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The basis for the creation of this research is that there are several regions that have not received WTP notifications from the BPK, this is due to many factors that prevent these regions from receiving WTP notifications from the BPK due to a lack of good management of regional assets. **Purpose:** this research is to find out the optimization, the inhibiting factors, the efforts made to overcome the inhibiting factors in optimizing the management of regional buildings and buildings to increase the local revenue of North Bengkulu Regency. **Method:** In this study using a qualitative approach with data collection techniques in the form of documentation and direct interviews with related parties. **Result:** The results obtained show that the management of assets for the North Bengkulu district government's buildings has not gone well, as can be seen from the asset utilization data obtained, the implementation of which is still unclear in supporting PAD. This is evidenced by the recording of budget realization which is empty or the data is unclear and there are no rules in determining rental prices for building assets owned by the North Bengkulu district government.. **Conclusion:** North Bengkulu is likened to submitting a standard building rental rate proposal to the regent and applying optimal utilization so that none of the assets owned are neglected and can help the region's original income as well as the addition of personnel formation to assist in the management and management of BMD. improve the competence of management personnel determined through education and training.

Keywords: Fixed Assets, Asset Utilization, Regional Original Income

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dasar terciptanya penelitian ini adalah adanya beberapa daerah yang belum mendapatkan pemberitahuan WTP dari BPK, hal ini disebabkan banyak faktor yang membuat daerah tersebut tidak dapat menerima pemberitahuan WTP dari BPK dikarenakan kurangnya pengelolaan baik harta benda, harta benda daerah. **Tujuan:** penelitian ini adalah untuk mengetahui pengoptimalisasian, faktor penghambat, upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam optimalisasi pengelolaan aset tetap Gedung dan bangunan daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Bengkulu utara **Metode:** Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Metode analisis yang digunakan adalah dengan metode deskriptif.. **Hasil/Temuan:** Diperoleh hasil bahwa pengelolaan aset atas gedung dan

bangunan pemerintah kabupaten Bengkulu utara belum berjalan dengan baik dapat terlihat dari data pemanfaatan aset yang didapat masih belum jelas pelaksanaannya dalam menunjang PAD. Hal ini dibuktikan dengan pencatatan realisasi anggaran yang kosong atau tidak jelas datanya dan tidak adanya aturan dalam penetapan harga sewa atas aset gedung bangunan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Bengkulu Utara upaya yang dilakukan harus dilaksanakan guna pemanfaatan yang dilakukan di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilaksanakan secara optimal membantu pendapatan asli daerah. **Kesimpulan:** Bengkulu Utara diibaratkan mengajukan usulan standar tarif sewa gedung kepada bupati dan menerapkan pemanfaatan yang optimal agar tidak ada aset yang dimiliki terbelengket dan dapat membantu pendapatan asli daerah serta penambahan formasi personel untuk membantu di bidang pengelolaan dan pengelolaan BMD. meningkatkan kompetensi personel manajemen yang ditetapkan melalui pendidikan dan pelatihan.

Kata Kunci: Aset Tetap, Pemanfaatan Aset, Pendapatan Asli Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara kesatuan republik indonesia adalah negara yang menggunakan sistem desentralisasi pada sistem pemerintahannya, desentralisasi memberikan keleluasaan kepada seluruh daerah di indonesia untuk mengatur otonomi daerah masing-masing. Dengan berlakunya otonomi daerah, kebutuhan akan sumber-sumber pendapatan menjadi sangat penting karena menurut UU No. 32 Tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dapat mengelola proses pembangunan daerahnya dengan lebih baik dan efektif. wilayah sendiri . karena mereka lebih mengetahui kelebihan dan kekurangan daerah dan potensi daerah untuk mengoptimalkan sumber daya daerah dan menjalankan ekonomi daerah semandiri mungkin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berimplikasi pada kewenangan daerah yaitu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibuka untuk memenuhi kebutuhan kas semua urusan pemerintahan daerah. Pendapatan keuangan yang dikirim ke pemerintah daerah menciptakan hubungan keuangan antara negara bagian dan pemerintah daerah. Terwujudnya otonomi daerah menunjukkan bahwa pemerintah mensosialisasikan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan pemberian otonomi daerah bukan berarti daerah tidak lagi memiliki tanggung jawab, tetapi dimaksudkan agar daerah dapat menggunakan dan mencari pendapatan asli daerah (PAD) sendiri dan dengan leluasa menggunakan dana yang diterima daerah untuk kepentingan masyarakat daerah. dengan batasan-batasan terbatas yang ditentukan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah ditetapkan. Pemerintah pusat juga tetap bertanggung jawab untuk memberikan beasiswa kepada setiap daerah di Indonesia, karena tidak semua daerah memiliki geografi dan keterampilan yang sama.

pendapatan asli daerah kabupaten Bengkulu utara menunjukkan grafik naik turun hal ini disebabkan adanya pandemi yang melanda dunia termasuk juga di Bengkulu utara. di indonesia setiap wilayahnya mempunyai barang serta aset nya masing masing, seperti yang tertera didalam Pasal 10 dan 11 UU No. 1 Tahun 2004 Harta adalah setiap harta ataupun benda kepemilikan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Harta teritorial adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau semua barang yang berasal dari APBN. pembelian legal lainnya. Barang dan aset harus diolah untuk meningkatkan pendapatan utama daerah. Khususnya di daerah Bengkulu Utara yang bangunan dan bangunannya merupakan aset tetap. Jika dioptimalkan, sumber daya ini dapat membantu meningkatkan penjualan daerah.

Berdasarkan table diatas bisa kita lihat jumlah aset tetap gedung dan bangunan untuk kabupaten Bengkulu utara ,setiap daerah tentu sangat ingin mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, dll (LKPD), keuangan Kementerian Lembaga (LKKL). digugat oleh kepala daerah, namun ada juga beberapa daerah yang belum mendapatkan pemberitahuan WTP dari BPK, hal ini disebabkan banyak faktor yang membuat daerah tersebut tidak dapat menerima pemberitahuan WTP dari BPK dikarenakan kurangnya pengelolaan baik harta benda, harta benda daerah.

Menurut M. Yusuf (2013: 9) bahwa: “Aset daerah adalah komponen yang terkait dengan neraca daerah, dan sebagai bangunan dan aset tetap bangunan, termasuk barang di gudang sebagai bagian dari manajemen aktif.” dengan didaptkannya opini bagi kabupaten Bengkulu utara merupakan sebuah prestasi yang perlu dipertahankan dikarenakan pengelolaan aset bukanlah sesuatu hal yang mudah akan tetapi masih ada beberapa catatan kelemahan Standar Pengawasan Internal (SPI) karena masih terdapat selisih rekening Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang ditemukan BPK terkait pengelolaan gedung dan konstruksi aset tetap yang tidak sesuai dengan peraturan pengelolaan kekayaan daerah, gedung dan aset tetap gedung tersebut belum diinventarisasi. paling banyak, baik gedung maupun aset tetap gedung tidak ada nilainya karena tidak diketahui keberadaannya Manajemen aset Gedung dan bangunan, perhatian diberikan tidak hanya pada manajemen, tetapi juga pada efektivitas, efisiensi dan penciptaan nilai tambah dalam pengelolaan aset tersebut. Pengelololaa aset tetap gedung dan bangunan juga tidak terlepas dari peran ASN terkait ,tidak mungkin suatu daerah mendapatkan opini WTP jika sumberdaya manusianya tidak kompeten,dan juga bertugas memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas,peran ASN yang berkompeten dan berkualitas akan menciptakan pengelolaan aset tetap gedung dan bangunan yang tertib.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Tahun 2018 kabupaten Bengkulu Utara mendapatkan opini WTP secara berturut turut sampai dengan tahun 2021 ditahun sebelumnya Kabupaten Bengkulu utara belum mendapatkan opini WTP dikarenakan di tahun sebelumnya masih belum sesuai dengan standar aturan akuntansi pemerintah yang disebabkan oleh pengelolaan aset tetap belum diproses secara baik dan pengelolaan dari pajak daerah juga belum dilakukan sesuai dengan regulasi sehingga mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan dan representasi nilai aset tidak sesuai yang hal inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten Bengkulu utara untuk tetap dapat mempertahankan opini WTP tahun 2022. Upaya mempertahankan opini WTP dari BPK. mengelola keuangan daerah memiliki peran yang cukup besar dan signifikan karena aset tetap gedung dan bangunan memiliki nilai yang besar dan juga merupakan komponen yang penting bagi pembangunan nasional,aset tetap gedung dan bangunan meliputi Gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, serta jalan, jaringan dan pengairan, aset tetapgedung dan bangunan tersebut harus dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah khususnya di wilayah Bengkulu Utara yang masih banyak . dalam pengelolaan aset yang terkadang ditemukan tidak tahu dimana, hal ini terlihat dari masih banyaknya rumah dinas yang ditempati oleh pekerja yang seharusnya tidak ada dan tidak berhak, hal ini tentunya akan mempengaruhi pengelolaan aset tetap. bangunan dan struktur, karena gedung perkantoran merupakan salah satu aset tetap bangunan, dan bangunan serta rumah yang sudah tidak dihuni lagi dapat disewakan dan menambah penghasilan, juga banyak bangunan terbengkalai dan aset tetap lainnya di gedung dan bangunan lainnya, dan Pemkab Bengkulu Utara seharusnya bisa memanfaatkan barang-barang yang rusak, misalnya barang-barang yang sudah tidak terpelihara dan merugikan daerah bisa dilelang, dan masih banyak juga barang-barang tambang yang belum ada

lahannya. Sertifikat ini menjadi salah satu kendala dalam memaksimalkan pengelolaan kekayaan karena sertifikat hak milik tidak lengkap.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, beberapa diantaranya yaitu penelitian dari Faldhohomura Armanzi Hukmi tahun 2021 dengan judul Pemanfaatan Aset tetap gedung dan bangunan Daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah Bengkulu utara menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan Di Bengkulu Utara, pemanfaatan aset cukup baik, namun BPKAD masih memiliki beberapa kendala, namun kendala tersebut telah beberapa kali diatasi, yaitu dengan menawarkan sewa konstruksi konvensional dan meningkatkan kualitas manajemen aktif personel. sehingga semua aset dapat dimanfaatkan sepenuhnya (Hukmi, 2021). Hal yang serupa dengan optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk masyarakat pesisir di Kecamatan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe yang masih sama bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan konsep pembangunan berkelanjutan (Pararang, Gosal, & Kimbal, 2017). Terakhir, dengan lokus yang berbeda tetapi tetap dengan optimalisasi bahwasanya pemberdayaan masyarakat desa melalui sinergi Program PUAP dengan Desa Mandiri Pangan yang masih sama untuk memberdayakan masyarakat desa dengan mata pencaharian usaha pertanian (Darwis & Rusantra, 2011). Lalu penelitian dari Alifah Salsabila tahun 2020 dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Aset tetap gedung dan bangunan Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Di Kota Jambi Provinsi Jambi, menggunakan metode Kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan optimalisasi bangunan dan tata bangunan di Kota Jambi telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ada, namun tidak dilakukan secara maksimal. Karena masih ada keterbatasan sebagai hasilnya terhambatnya pelaksanaan dan optimalisasi pengelolaan aset tetap gedung dan bangunan pada BPKAD Kota Jambi (Salsabila, 2020). Lalu penelitian dari Fitri Wulandari tahun 2019 dengan judul Pengelolaan aset daerah atas tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan metode kualitatif. Hasilnya penelitian ini adalah Pengelolaan aset daerah di wilayah Kepulauan Meranti dengan optimalisasi pemanfaatan aset SKPD, optimalisasi pemanfaatan aset pihak ketiga, optimalisasi pemanfaatan aset masyarakat, dan peningkatan pengungkapan aset milik pemerintah di Kepulauan Meranti (Wulandari, 2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh peneliti faldho hukmi hamura memfokuskan kepada pemanfaatan seluruh aset tetap gedung dan bangunan untuk peningkatan pendapatan aset daerah dan mempertahankan opini WTP didaerah. Sedangkan peneliti Murni memfokuskan kepada pemanfatan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar dapat membantu pendapatan asli daerah didaerah tersebut sedangkan dua karya lebih memfokuskan ke aset tanah dan tulisan ini memfokuskan kepada optimalisasi pemanfaatan aset Gedung dan bangunan yang agar dapat membantu pendapatan asli daerah di kabupaten Bengkulu utara.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan optimalisasi pengelolaan aset tetap Gedung dan bangunan daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah Bengkulu utara provinsi Bengkulu.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. desain menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Metode penelitian deskriptif terkait dalam meneliti dan memproses data-data yang berupa kata dan gambar untuk ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian kualitatif teori dikembangkan selama proses pengumpulan data. serta melibatkan interpersi dan pendekatan naturalistic untuk materi pokoknya. Penelitian juga menggambarkan keadaan keseluruhan data atau objek (seseorang, masyarakat, lembaga, dan lainnya), pola pemikiran, hubungan antara kejadian atau fenomena dijadikan sebuah kesimpulan yang bersifat umum, mendapatkan data dari responden dilapangan juga membantu peneliti agar dapat memecahkan permasalahan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan analisa terhadap pemanfaatan aset yang dilakukan Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu utara.

3.1. Pemanfaatan Aset Tetap Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Pemanfaatan gedung dan gedung milik pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui kontrak pembangunan dan perjanjian kerjasama dengan kerangka pemanfaatan BMD Kabupaten Bengkulu Utara sehingga dapat membantu peningkatan PAD Kabupaten Bengkulu Utara, namun pada kenyataannya belum maksimal, seperti terlihat pada tabel realisasi upah dan tarif sewa tahunan, pengaruh pendapatan awal daerah masih belum jelas. penggunaan bangunan dan pembangunan aset tetap hanya sekitar 5% dari total PAD yang diterima Kabupaten Bengkulu Utara.

Pada bagian pembahasan ini, peneliti memaparkan berbagai informasi untuk mengoptimalkan pengelolaan tetap di Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan teori Siregar (2004: 518) yang membagi pengelolaan investasi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan inventarisasi
2. Tinjauan hukum
3. Penilaian real estat
4. Optimalisasi aset
5. Pemantauan dan pengendalian

3.2. Optimalisasi Aset tetap

Berdasarkan teori Siregar (2004: 518), proses optimalisasi aset tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut: Pengelolaan aset untuk mengoptimalkan potensi fisik dan Identifikasi potensi aset.

kegiatan khusus BKAD adalah penyewaan potensi fisik aset tetap yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara, seperti penyewaan tanah dan bangunan kepada masyarakat dan penggunaan koperasi, sehingga Disebut BKAD bertujuan untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk meningkatkan potensi dan nilai manfaat dari aset tersebut.

proses identifikasi aset potensial dapat dilakukan dengan cara yang berbeda, yaitu untuk aset bergerak seperti kendaraan dinas, dilakukan penilaian kecocokan lelang dan penilaian kesesuaian lelang. lelang dapat menambah kas daerah, dalam hal ini pendapatan awal daerah (pendapatan daerah). Penyewaan aset tetap seperti gedung yang digunakan untuk kepentingan umum seperti gedung Kemumu Pesanggrahan yang digunakan untuk tempat pertemuan, pernikahan, dll, dengan tarif yang ditentukan

sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dan bagaimana rumah dinas Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak terpakai bisa disewa untuk menambah PAD.

3.4 Pemantauan dan Pengendalian

Pemantauan dan pengendalian merupakan langkah terakhir dalam pelaksanaan manajemen aset/manajemen aset. Monitoring dilakukan untuk mencegah berbagai kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan aset BKAD Kabupaten Bengkulu Utara. Sekaligus pengawasan dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan barang yang benar dan apabila terjadi kegagalan dapat dilakukan koreksi langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut untuk terciptanya tertib administrasi pengelolaan barang di Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan demikian, penggunaan setiap aset dapat dilacak dengan jelas, mulai dari ruang lingkup penggunaan hingga penanggung jawabnya. Hal ini dapat memperkecil peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintah daerah.

pengelolaan aset BKAD dibantu oleh berbagai yaitu pihak internal dan eksternal. Lembaga inspeksi dan BPKP menjadi pihak internal dalam pengendalian dan pengawasan aset yang berperan penting dalam membantu pemerintah provinsi dan menyiapkan LKPD untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan. Tindakan yang dapat dilakukan adalah melakukan review terhadap LKPD Wilayah Bengkulu Utara sebelum diserahkan kepada pihak eksternal yaitu BPK untuk melakukan review/audit terhadap LKPD Wilayah Bengkulu Utara

BKAD selaku pengelola investasi administrasi Bengkulu Utara menggunakan sistem informasi yang digunakan sebagai usulan untuk membuat tertib administrasi dalam pengelolaan aset, dan sistem ini juga diatur dan dialihkan ke lembaga BPKP provinsi BKAD Bengkulu Utara, sehingga semua aset menjadi milik unit administrasi Bengkulu Utara. Tahvli dapat tersimpan dengan baik di dalam sistem dan memudahkan pihak yang berkepentingan dengan instansi tersebut untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan aset yang dilakukan, sistem tersebut dinamakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan modul aset. SIPKD adalah aplikasi Menteri Dalam Negeri yang memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan real estat daerah, khususnya BKAD Kabupaten Bengkulu Utara, untuk mempertahankan opini WTP dan meningkatkan pendapatan daerah.

3.5 Faktor Penghambat Optimalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Pengelolaan aset yang dilakukan oleh BKAD tidak selalu berjalan sesuai harapan, namun berbagai permasalahan tetap saja terjadi. Kendala kegiatan pengelolaan aset tetap BKAD di wilayah Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya cakupan dokumen kepemilikan, bangunan yang tidak terpakai dan nominal sewa yang tidak sesuai dalam penggunaan aset BMD.
2. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang handal untuk system informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)

3.6 Upaya BKAD dalam Mengatasi Kendala

Pelaksanaan pengelolaan aset di BKAD Kabupaten Bengkulu Utara berjalan optimal sesuai dengan konsep pengelolaan, standar peraturan dan SOP (Standar Operasional Prosedur). Pengelolaan aset tetap juga dikelola dengan cukup baik dalam pengelolaan bahan habis pakai OPD sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan aset tetap, yang mengharuskan BKAD, khususnya di bidang aset, sebagai pendamping manajemen dan pusat pengelolaan aset daerah, melakukan berbagai inisiatif perbaikan untuk mengoptimalkan proses pengelolaan aset tetap. Pemerintah Negara Administratif Bengkulu Utara. Upaya yang dilakukan antara lain.

1. Mengusulkan kepada gubernur tentang standar harga sewa gedung dan fasilitas serta pembentukan penambahan personel di bidang pengelolaan BMD.
2. Pengembangan keterampilan pegawai keuangan melalui keikutsertaan dalam pelatihan (training).
3. Dimanfaatkan secara optimal sehingga tidak ada harta yang terlewatkan dan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

pengelolaan aset BKAD dibantu oleh berbagai yaitu pihak internal dan eksternal. Lembaga inspeksi dan BPKP menjadi pihak internal dalam pengendalian dan pengawasan aset yang berperan penting dalam membantu pemerintah provinsi dan menyiapkan LKPD untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan. Tindakan yang dapat dilakukan adalah melakukan review terhadap LKPD Wilayah Bengkulu Utara sebelum diserahkan kepada pihak eksternal yaitu BPK untuk melakukan review/audit terhadap LKPD Wilayah Bengkulu Utara. BKAD selaku pengelola investasi administrasi Bengkulu Utara menggunakan sistem informasi yang digunakan sebagai usulan untuk membuat tertib administrasi dalam pengelolaan aset, dan sistem ini juga diatur dan dialihkan ke lembaga BPKP provinsi BKAD Bengkulu Utara, sehingga semua aset menjadi milik unit administrasi Bengkulu Utara. Tahvi dapat tersimpan dengan baik di dalam sistem dan memudahkan pihak yang berkepentingan dengan instansi tersebut untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan aset yang dilakukan, sistem tersebut dinamakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan modul aset. SIPKD adalah aplikasi Menteri Dalam Negeri yang memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan real estat daerah, khususnya BKAD Kabupaten Bengkulu Utara, untuk mempertahankan opini WTP dan meningkatkan pendapatan daerah.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

proses identifikasi aset potensial dapat dilakukan dengan cara yang berbeda, yaitu untuk aset bergerak seperti kendaraan dinas, dilakukan penilaian kecocokan lelang dan penilaian kesesuaian lelang. lelang dapat menambah kas daerah, dalam hal ini pendapatan awal daerah (pendapatan daerah). Penyewaan aset tetap seperti gedung yang digunakan untuk kepentingan umum seperti gedung Kemumu Pesanggrahan yang digunakan untuk tempat pertemuan, pernikahan, dll, dengan tarif yang ditentukan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dan bagaimana rumah dinas Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak terpakai bisa disewa untuk menambah PAD.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan kajiannya terhadap pemanfaatan aset tetap gedung dan gedung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bengkulu Utara dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi aset modal di Kabupaten Bengkulu Utara, dimana penggunaan modal dicapai dengan menggunakan bangunan dan aset konstruksi yang dapat membantu pendapatan daerah, telah dilaksanakan dan berdampak pada peningkatan penjualan daerah wilayah utara Bengkulu
2. Masih adanya bangunan yang kosong, surat kepemilikan yang tidak lengkap, dan nominal harga sewa yang tidak sesuai dengan pemanfaatan aset BMD menjadi penghambat BKAD menggunakan aset tetap pada aset Gedung dan bangunan di Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Langkah-langkah yang diambil BKAD untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan penggunaan aset Gedung dan bangunan di kabupaten Bengkulu utara Bengkulu Utara diibaratkan mengajukan usulan standar tarif sewa gedung kepada bupati dan menerapkan pemanfaatan yang optimal agar tidak ada aset yang dimiliki terbengkalai dan dapat

membantu pendapatan asli daerah serta penambahan formasi personel untuk membantu di bidang pengelolaan dan pengelolaan BMD. meningkatkan kompetensi personel manajemen yang ditetapkan melalui pendidikan dan pelatihan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. sumber rujukan penelitian persandian termasuk acuan penelitian pengamanan informasi pemerintah daerah

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengelolaan aset karena berkaitan dengan pentingnya administrasi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara beserta seluruh pegawai di lingkungan dinas dan juga seluruh elemen yang berjasa mendukung hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tulisan ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Hukmi, Faldhomura A. 2022. Pemanfaatan aset Tetap Daerah Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Salsabila, Alifah. 2020. OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TETAP DALAM MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.